



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PESANAN (SP)
e-KATALOG
KB2-P2404-8977509

Nomor : 888/PBJ-Sekrt/IV/2024
Tanggal : 1 April 2024

PEKERJAAN :

Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua

LOKASI :

KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN ANGGARAN 2023

Antara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dengan

Kontraktor Pelaksana
PT. TRIO MOTOR
Jl. A. Yani No. 61 Palangka Raya



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)
KB2-P2404-8977509

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN /
PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALTENG

NOMOR : 888/PBJ-Sekret/IV/2024
TANGGAL : 1 April 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

RAINER DANNY P. M., SKM., MKM

Kuasa Pengguna Anggaran

Jl. Yos Sudarso No. 9 Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian** ;

PT. TRIO MOTOR

Jl. A. Yani No. 61 Palangka Raya **Penyedia** ;

Yang diwakilkan oleh : **DENNY SETIAWAN NATA** sebagai Kepala Sentra Penjualan

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET KB2-P2404-8977509

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga (Rp.)
4991300001-KB2-005219669 VARIO 160 ABS	4	IDR	30.561.000,00	0,00	1 Mei 2024	122.244.000,00

Terbilang : Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.

2. Penyedia memiliki kewajiban :

a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik ;

- b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama ;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia ;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan ;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada) ;
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak :
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan ;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada) ;
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban :
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini ; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang ;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
- Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 1 Mei 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia atau selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak 1 April 2024 s/d 1 Mei 2024.
3. Alamat Pengiriman Barang
- Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
- Jl. Yos Sudarsono 9 - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 1 Mei 2024.
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa :
 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi ; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan :
 1. penyedia telah mengajukan tagihan ;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila :
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja ;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima ; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. peringatan tertulis ;
 2. denda ; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing ; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila :
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP ;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan ;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang ; dan/atau

- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP ;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan ; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Provinsi Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatangan/
Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

RAINER DANNY POLUAN MAMAHIT
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)

PT. TRIO MOTOR
Palangka Raya

DENNY SETIAWAN NATA
Kepala Sentra Penjualan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391

Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

Palangka Raya, 22 April 2024

Nomor : 85/Sekre-1/IV/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Plat Merah Operasional Roda Dua

Yth. Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah
Up. Kepala Bagian Administrasi Registrasi dan Identifikasi
Ub. SAMSAT

di -
Palangka Raya

Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa berupa belanja modal kendaraan bermotor roda dua di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024, dengan ini kami mohon perubahan warna plat menjadi plat merah dengan data kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : VARIO 160 ABS
Nama Pemilik : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Alamat : JALAN YOS SUDARSO NO. 9 PALANGKA RAYA
Kelurahan : MENTENG Kecamatan : JEKAN RAYA
Kota : PALANGKA RAYA
Provinsi : KALIMANTAN TENGAH

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

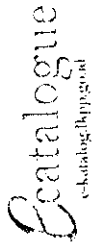
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM

Pemimpin Utama Madya

NIP. 196608072000031006



Informasi Paket

Etalase Produk	: Kendaraan Bermotor	Tanggal Buat	: 1 April 2024
ID Paket	: KB2-P2404-8977509	Tanggal Ubah	: 1 April 2024
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Harga Total	: Rp 122.244.000,00
Instansi	: Provinsi Kalimantan Tengah	Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah	
Satuan Kerja	: Dinas Kesehatan	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Yos Sudarso No 09 Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 00.119.643.5-711000	Tanggal Kurs	: 1-4-2024
Sumber Dana	: APBD (1.02.01.1.07.0002.5.2.02.01.0004.)	Tahun Anggaran	: 2024

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
Laksana Adi Nugroho, Skm laksanaadinugroho@yahoo.co.id	RAINER DANNY POLLUAN MAMAHIT 081314412809 infodinkes@gmail.com	PT. TRIO MOTOR JL. Perintis Kemerdekaan No.45AA eka.harilestari@triomotor.co.id 0511-3355500	Palangka Trio Tirta Sari Jl.A Yani No. 61 Palangkaraya trio.ptts@triomotor.co.id

Daftar Pesanan

Nama Produk	VARIO 160 ABS
Manufaktur	
Kuantitas	4.00
Harga Satuan	Rp 30.561.000,00
Tanggal Pengiriman	1-5-2024 (1 Mei 2024)
Total Harga	Rp 122.244.000,00
Catatan	Harga sudah termasuk pajak dan Ongkos kirim, Warna kendaraan semua HTAM, jangka waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari Kalender

(LS) GUNSON (ST)

Tahun Anggaran: 2024					
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Supaya menerbitkan SP2D kepada: Dinas SKPD : Dinas Kesehatan Nama Unit SKPD : Dinas Kesehatan Nama : PT. PALANGKA TRIO TIRTA SARI/CHINTA (PT. TRIO MOTOR) No. Rekening Bank : 1000103004113 Nama di Rekening Bank : PT. PALANGKA TRIO TIRTA SARI/CHINTA (PT. TRIO MOTOR) Nama Bank : Bank BPD KALTENG NPWP : 017002296711000 Jasar Pembayaran : 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024 4					
Jumlah SPP Diminta Rp122.244.000 Nomor dan Tanggal SPP : 52.00/02.0/000065/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/5/2024, tanggal 28 Mei 2024					
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran					



RINGKASAN KONTRAK

PEKERJAAN : PENGADAAN BELANJA MODAL KENDARAAN

RODA DUA

: Kota Palangka Raya

: 888/PBJ-Sekrt/IV/2024

: 1 April 2024

: PT. PALANGKA TRIO TIRTA SARI

: Jl. A. Yani No.61 Palangka Raya

: 01.700.229.6-711.000

: Bank Kalteng

: 1000103004113

: Rp. 122.244.000,-

(Seratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh empat

ribu rupiah)

: LS / Pembayaran Sekaligus

: 1 April 2024 s/d 1 Mei 2024

: APBD

URAIAN DAN VOLUME PEKERJAAN : Diatur sesuai Surat Perintah Pesanan (SP)

Palangka Raya, 28 Mei 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Rainer Danny Poluan Mamahit, SKM, MKM
NIP. 19861209 200903 1 001



BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Untuk Pekerjaan : Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Nomor : 90/PBJ-Sekt/IV/2024
29 April 2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **DENNY SETIAWAN NATA**

Jabatan : Kepala Sentra Penjualan
Alamat : Jl. A. Yani No. 61 Palangka Raya

bertindak untuk atas nama PT. TRIO MOTOR dan dalam Surat Pesanan Pengadaan Barang ini bertindak selaku Kepala Sentra Penjualan, untuk dan atas nama PT. TRIO MOTOR selanjutnya disebut **Pihak Pertama**, dan

RAINER DANNY P. M., SKM., MKM

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
198612092009031001
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya

Selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia disebut **Pihak Kedua** :

Dengan memperhatikan :

1. Surat Pesanan (SP) nomor : 888/PBJ-Sekt/IV/2024 Tanggal 1 April 2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : /PBJ.Sekt/IV/2024
- Tanggal 26 April 2024

Dengan ini **MENYATAKAN** :

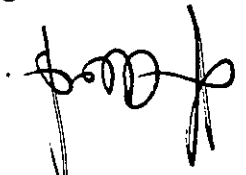
1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang sesuai dengan pekerjaan tersebut diatas kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menerima seluruh hasil pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan Baik dan Lengkap.
3. Uraian mengenai jenis, jumlah satuan, harga satuan dan jumlah keseluruhan barang yang diserahkan adalah sebagai berikut :

* Harga termasuk Pajak					
SERATUS DUA PULUH DUA JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU RUPIAH					
TERBILANG :					
T O T A L					
122.244.000					
122.244.000					
30.561.000					
(Rp.)					
Total (Rp.)					
Satuan					
Kuantitas					
Unit					
4					
VARIO 160 ABS					
1.					
No.					
Jenis Barang					

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya oleh Kedua Belah Pihak serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :
YANG MENERIMA

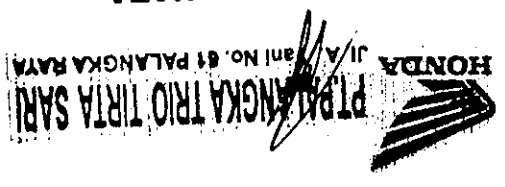
Kuasa Pengguna Anggaran,



RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

PIHAK PERTAMA :
YANG MENYERAHKAN

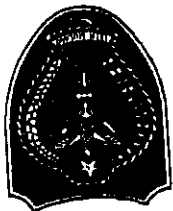
PT. TRIO MOTOR



DENNY SETIAWAN NATA
Kepala Sentra Penjualan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com



Pekerjaan : Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	
Sumber : APBD Dinas Kesehatan Provinsi	Dana : Kalimantan Tengah
Tahun : 2024	

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, dan berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 888/PBJ-Sekt/IV/2024 Tanggal 1 April 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang oleh :

I. Nama : RAINER DANNY P.M., SKM., MKM
NIP : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya
Bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.

II. Nama : DENNY SETIAWAN NATA
Jabatan : Kepala Sentra Penjualan
Alamat : Jl. A. Yani No. 61 Palangka Raya
Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang.

Dengan ini menyatakan telah melaksanakan barang untuk :

Pasal I

- a. Pekerjaan : Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua
b. SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
c. Sumber Dana : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024
d. Surat Pesanan (SP) : 888/PBJ-Sekt/IV/2024 Tgl. 1 April 2024
e. Jangka Waktu : 30 (Tiga Puluh) hari kalender
f. Harga : Mulai Tanggal : 1 April 2024
: Selesai : 1 Mei 2024
: Rp. 122.244.000,-
(Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

g. Rincian uraian pekerjaan, volume dan nilai pekerjaan sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Ongkos Kirim Rp	TOTAL	122.244.000
1.	VARIO 160 ABS	4	Unit	30.561.000	0	122.244.000	122.244.000
TERBILANG :							
SERATUS DUA PULUH DUA JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU RUPIAH							
* Harga sudah termasuk Pajak							

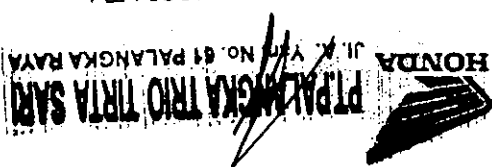
Pasal 2

1. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya (100 %) oleh pihak Penyedia Barang, sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Surat Pesanan (SP).
 2. Pekerjaan tersebut diatas telah dilaksanakan seluruhnya 100 % oleh Pihak Penyedia Barang dengan jumlah, volume lengkap, kondisi baik dan baru sesuai dengan Surat Pesanan (SP).
 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dinyatakan telah selesai sehingga selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Barang/Pekerjaan tersebut diatas.
- Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

RAINER DANNY P.M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

Penyedia Barang :
PT. TRIO MOTOR



DENNY SETIAWAN NATA
Kepala Sentra Penjualan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
Jalan Yos Sudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120
PALANGKA RAYA 73112

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 905/PBJ-Sekt/IV/2024
Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya
Menerangkan bahwa :

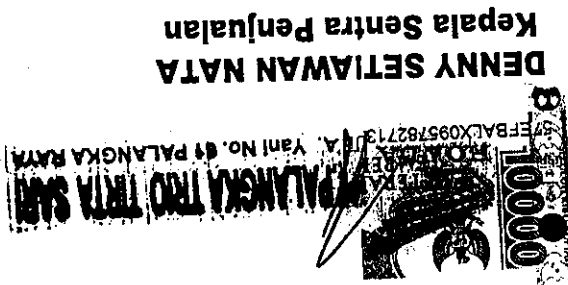
1. Pembayaran sekaligus atas pekerjaan Pengadaan :
Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor
Berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 888/PBJ-Sekt/IV/2024, tanggal 1 April 2024 dengan nilai sebesar : **Rp. 122.244.000,-** (Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)
2. Pembayaran tersebut dibayarkan kepada : **PT. TRIO MOTOR** melalui **Bank Kalimantan Tengah** dengan Nomor Rekening **1000103004113**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 30 April 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,

RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001



DENNY SETIAWAN NATA
Kepala Sentra Penjualan

K W I T A N S I

Tahun Anggaran : 2024
Nomor Buku :
Tanggal Buku :
Kode Rekening : 5.2.02.02.01.0004
Kode Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0002

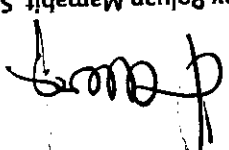
Sudah terima dar : Pengguna Anggaran/Kuasa Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

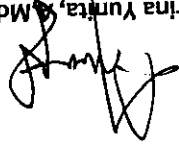
Uang sebanyak : Rp 122.244.000

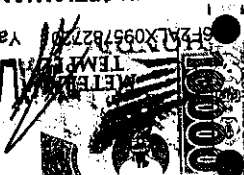
Untuk : Pembayaran sekaligus atas Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua berdasar SP Nomor : 888/PBJ-Sekrt/IV/2024 Tanggal : 1 April 2024 pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

Terbilang : == Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah ==

Palangka Raya, 30 April 2024

Setuju Dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran,

Rainer Danny Poluan Mamahit, SKM, MKM
NIP.19861209 200903 1 001

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Afrina Yunita, S.Md
NIP. 19850604 201101 2 002


Denny Setiawan Nata
NIP. 19850604 201101 2 002

Barang-barang tsb telah diterima dengan
cukup dan dalam keadaan baik oleh:
Nama :
Jabatan :
Barang-barang tersebut telah dimasukkan
dalam daftar inventaris/ Pemakaian :
Uang tsb dibayar lunas kepada yang
berhak menerimanya oleh :
Nama :
Jabatan :